



Dugaan Korupsi Bansos, DPRD-Disdik Saling Tudung

Ribuan Pasang Sepatu dan Seragam Tidak Sampai ke Siswa SD

Bekasi, Warta Kota

DANA bantuan sosial (bansos) 2014 untuk pengadaan seragam dan sepatu siswa sekolah dasar di Depok senilai Rp 15,8 miliar, diduga dikorupsi. DPRD Kota Depok dan Dinas Pendidikan (Disdik) saling lempar tanggung jawab tentang penggunaan dan pembelanjaan dana tersebut.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Herry Pansila, dana bansos itu berupa hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang didapat dan diajukan DPRD Depok. Penggunaan dan pembelanjaan dana bansos itu, kata Herry, melibatkan anggota dewan terkait. "Pemerintah tidak pernah mengajukan program tersebut," katanya, kemarin.

Disdik tidak bisa memastikan pendistribusian sepatu dan seragam di setiap SD. Alasannya, penentuan pendistribusian juga atas keinginan anggota dewan.

Sementara itu, anggota Badan Anggaran (banggar) DPRD Kota Depok, Babai Suhaimi, meminta Disdik Kota Depok menerima konsekuensi dan memaparkan secara terbuka jika ada penyalahgunaan dana bansos Rp 15,8 miliar. "Pemerintah Kota Depok dalam hal ini Disdik seharusnya konsekuen dengan ini. Kalau ada perbuatan yang salah, baik disengaja atau tidak memang harus ada hukumannya," kata

Babai, yang menjadi anggota banggar DPRD Depok periode 2009-2014 dan 2015-2020, Rabu (1/7).

Menurutnya, jika ditemukan ada pelanggaran saat pengadaannya memang ada sanksinya. "Namun, bila tidak ada pelanggaran, justru program itu bisa didorong kembali," katanya.

Babai menuturkan, dalam program itu, DPRD Depok sekedar mengesahkan pengajuan dana yang diminta Disdik Depok. "Sebab, kami menilai bantuan itu perlu diberikan kepada siswa SD di Depok. Dewan melihat dengan adanya seragam dan sepatu yang sama bagi siswa SD, harapannya ada kesetaraan antar-setiap siswa," katanya.

Mengenai adanya dugaan korupsi itu, Babai mengaku mendukung dan menyerahkan semuanya ke penyidik kepolisian. "Kami serahkan semuanya ke yang berwajib. Sebab pengawasan penggunaan anggaran sudah pasti dilakukan oleh dewan. Terutama, Komisi D yang membidangi pendidikan. Komisi ini yang tahu apakah sesuai atau tidak dalam penggunaannya," kata Babai.

Ribuan sepatu tak bertuan

Kepala Subdirektorat V Bidang Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris

Kami sudah periksa saksi dari 45 SD di Kota Depok. Hasilnya ditemukan sekitar 5.014 seragam dan 9.693 pasang sepatu yang tidak pernah sampai ke tangan siswa penerima.

**Ajun Komisari Besar
Adjie Indra Dwiatma**
Kepala Subdirektorat V Bidang Tipikor
Dirreskrimsus Polda Metro Jaya

Besar Adjie Indra Dwiatma, menjelaskan, polisi menemukan ribuan pasang sepatu dan seragam yang tidak sampai ke siswa sekolah dasar.

"Kami sudah periksa saksi dari 45 SD di Kota Depok. Hasilnya ditemukan sekitar 5.014 seragam dan 9.693 pasang sepatu yang tidak pernah sampai ke tangan siswa penerima. Kami juga lakukan penelusuran ke pabrik pembuat seragam dan sepatu yang berlokasi di Kota Bandung," ujar Adjie Indra, Selasa (30/6).

Dari pabrik seragam dan sepatu itu ditemukan selisih perbedaan nilai antara rancangan alokasi dan realisasi. Selain itu, polisi juga menemukan sejumlah barang yang tidak sesuai dengan ketentuan. "Dalam

waktu dekat, pemeriksaan akan mengarah pada tersangka dan inisiator," ucapnya.

Menurutnya, pengadaan seragam dan sepatu siswa SD di Depok ini dinilai terlalu dipaksakan oleh Disdik Depok. Pasalnya, pengadaan tersebut tidak layak dilakukan. "Korupsi yang dilakukan diduga berja-maah. Mulai dari kepala dinas pendidikan ke atas," katanya.

Total dana anggaran yang dikucurkan untuk bansos seragam dan sepatu sekolah Rp 15,8 miliar. Siswa yang berhak menerimanya 126.024 siswa dari 274 SD negeri di Depok. Namun, masih ada ribuan siswa yang belum menerimanya. Kerugian dari proyek itu diperkirakan mencapai Rp 10,8 miliar. **(bum)**